

bukan berasal dari hawa nafsu melainkan wahyu yang diwahyukan”, dengan cukup cerdas (*fathanah*) mengetahui sosiologi masyarakat Arab pada saat itu. Sehingga beliau dengan serta merta menggunakan tradisi-tradisi Arab untuk mengembangkan Islam. Sebagai salah satu contoh misalnya, ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, masyarakat Madinah di sana menyambut dengan iringan gendang dan tetabuhan sambil menyanyikan *thala'al-badru 'alaaina* dan seterusnya.

Berbeda dengan agama-agama lain, Islam masuk Indonesia dengan cara begitu elastis. Baik itu yang berhubungan dengan pengenalan simbol-simbol Islami (misalnya bentuk bangunan peribadatan) atau ritus-ritus keagamaan (untuk memahami nilai-nilai Islam). Dapat kita lihat, masjid-masjid pertama yang dibangun di sini bentuknya menyerupai arsitektur lokal-warisan dari Hindu. Sehingga jelas Islam lebih toleran terhadap warna atau corak budaya lokal. Tidak seperti agama yang lain, misalnya Budha yang masuk “membawa stupa”, atau bangunan gereja Kristen yang arsitekturnya ala Barat. Dengan demikian, Islam tidak memindahkan simbol-simbol budaya yang ada di Timur Tengah (Arab), tempat lahirnya agama Islam.

Demikian pula untuk memahami nilai-nilai Islam. Para pendakwah Islam kita dahulu, memang lebih luwes dan halus dalam menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat yang *heterogen setting* nilai budayanya. Mungkin kita masih ingat para wali yang di Jawa dikenal dengan sebutan Wali Songo. Mereka dapat dengan mudah memasukkan Islam karena agama tersebut tidak dibawanya dalam bungkus Arab, melainkan dalam racikan dan kemasan bercita rasa Jawa. Artinya,

adalah bercocok tanam dan berternak, sedangkan peternakan yang ada di sana hanyalah sebagai penghasilan sampingan.

Seperti pada umumnya, Dusun Nampu yang merupakan bagian dari pedukuhan Desa Nampu tak dapat terhindar dari sebuah problematika. Problematika yang dialami oleh masyarakat Dusun Nampu adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membangun interaksi sosial sesama warga dusun, sehingga aktivitas warga bisa dikatakan sangat kurang.

Selain itu, perbedaan ideologi dan faham aliran agama juga menjadi faktor utama problem sosial di Dusun Nampu. Sedangkan seseorang yang dituakan tidak bisa menjadi penengah masalah yang timbul dan menjadikan perpecahan antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan faham masing-masing.

Tidak dapat dipungkiri, perbedaan ideologi di Dusun Nampu membawa dampak yang sangat luar biasa dari segala aspek baik itu keagamaan, sosial, pendidikan, dan politik. Dualisme yang menjadi ikon perseteruan keyakinan tersebut tak lepas dari isu nusantara yang sudah mendarah daging yaitu Nahdlotul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Dengan mendirikan dua masjid sebagai tempat peribadatan dan pusat pengembang ajaran agama Islam di Dusun Nampu, semakin menunjukkan bahwa keduanya berkeinginan menumbuhkembangkan faham masing-masing dan seperti ada tujuan untuk saling berkuasa. Dari jumlah 377 KK di Dusun Nampu dapat dibagi sebagai penganut faham NU berjumlah ±189 dan dari Muhammadiyah sendiri berjumlah ±188 dan dapat dikatakan jamaah keduanya seimbang, data

berbagai kelompok. Karena kekuasaan yang dimiliki kelompok-kelompok elit maka kelompok-kelompok itu memiliki prioritas untuk menciptakan kekuasaan, peraturan dan hukum yang bersifat untuk kepentingan pribadi.

Prespektif sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian atau komponen yang mempunyai kepentingan, kebutuhan yang berbeda-beda dimana komponen yang satu berusaha menaklukkan kepentingan yang lain guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Menurut pandangan ahli sosiologi, masyarakat yang baik ialah masyarakat yang hidup dalam situasi konfliktual. Konflik sosial yang terjadi dijadikan sebagai kekuatan sosial utama dari perkembangan masyarakat yang ingin maju ke tahap-tahap yang lebih sempurna. Menurut teori konflik sosial elemen sosial memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda. Ketidaksamaan kepentingan dan pandangan tersebut yang memicu munculnya konflik sosial yang berujung saling menakhlukan, mengalahkan, melenyapkan diantara elemen lainnya.

Konflik adalah sebuah fenomena sosial yang terjadi disetiap lapisan atau elemen masyarakat. Fenomena ini merupakan gejala sosial yang selalu hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren yang artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja, tidak bisa terpisahkan dari elemen masyarakat. Dalam memahami tentang konflik sosial tidak bisa lepas dari teori konflik Karl Mark, dikarenakan menurut Karl Mark, pertentangan antara segmen-segmen masyarakat memiliki aset-aset yang bernilai. Bentuk dari konflik sosial itu

bermacam-macam, yaitu konflik antara individu, kelompok, atau bangsa. Potensi-potensi konflik sering kali terjadi dalam bidang perekonomian, dan memperlihatkan bahwasannya perjuangan atau konflik juga terjadi dalam distribusi status dan kekuasaan politik.

Munculnya sebuah konflik diakibatkan adanya perbedaan dan keberagaman kepentingan. Maka dapat diambil sebuah analisa yang mana terdapat di negara Indonesia yang tak luput dari konflik sosial. dalam sebuah ajaran atau keberagaman agama, memunculkan sebuah kelompok-kelompok yang satu sama lain saling bersinggungan. Konflik dari setiap tindakan-tindakan yang terjadi dan konflik tersebut terbagi secara horisontal dan vertikal. Konflik horisontal adalah konflik yang dimana berkembang antara anggota kelompok, seperti konflik yang terjadi antara NU dan Muhammadiyah. Sedangkan konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dan juga negara atau pemerintahan. Pada umumnya konflik-konflik ini muncul akibat ketidakpuasan masyarakat dengan kinerja pemerintahan, yang terjadi diakhir-akhir ini.

Terdapat banyak konflik yang terjadi di kehidupan masyarakat, dari hal-hal yang bersifat sederhana. Dan mengakibatkan kerusuhan, dendam sosial, dan ketidakrukunan antar umat beragama.

Menurut Karl Mark tentang kehidupan sosial yaitu:

1. Masyarakat sebagai arena yang didalamnya terdapat berbagai bentuk pertentangan.
2. Negara dipandang sebagai pihak yang terlibat aktif dalam pertentangan dan berpihak kepada kekuatan yang dominan.
3. Paksaan (*coercion*) dalam wujud hukum dipandang sebagai faktor utama untuk memelihara, melindungi lembaga-lembaga sosial.
4. Negara dan hukum dilihat sebagai alat penindasan yang digunakan oleh kelas yang berkuasa (kapitalis) demi kepentingan pribadi.
5. Kelas-kelas dianggap sebagai kelompok-kelompok sosial yang mempunyai kepentingan sendiri yang bertentangan antara satu dengan yang lain, sehingga konflik tak terelakan lagi.

Segi-segi pemikiran Karl Mark bertitikberat pada usaha untuk membuka sebuah kedok sistem masyarakat, pola kepercayaan, dan bentuk kesadaran dan ideologi yang mencerminkan dan memperkuat kepentingan kelas yang berkuasa. Meskipun dalam pandangannya, tidak seluruhnya kepentingan ditentukan oleh struktur kelas, ekonomi, kekuasaan, tetapi hal tersebut sangat mempengaruhi dan dipaksa oleh struktur tersebut. Pentingnya sebuah kondisi materil yang terdapat dalam struktur masyarakat, membatasi pengaruh budaya terhadap kesadaran individu.

Beberapa segi kenyataan sosial yang Mark tekankan, yang tidak dapat diabaikan oleh teori apapun yaitu pengakuan adanya struktur kelas dalam masyarakat, kepentingan ekonomi yang saling bertentangan diantara orang-orang dala kelas yang berbeda, pengaruh besar yang berdampak pada

Tahap IV: Masyarakat Borjuis, alat produksi sebagai industri. Konflik terjadi antara kelas borjuis dan buruh. Perjuangan kelas adalah perjuangan kelas Borjuis dan kelas Proletar.

Tahap V: Masyarakat komunis. Masyarakat ini kelas proletar akan menang

G. Tinjauan Pustaka

Kami perlu melakukan beberapa kajian pustaka dalam penelitian ini agar tidak terjadi penulisan ulang sehingga pembahasan yang dilakukan tidak sama dengan yang lain. Terdapat buku, jurnal, skripsi atau sejenisnya yang pernah ditulis oleh beberapa orang yang menuliskan hal yang serupa tapi berbeda dengan penelitian yang penulis ambil, diantaranya adalah:

Pada tahun 2013, skripsi karya Khumairotul Ana, Jurusan Sosiologi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, menulis skripsinya tentang “*Konflik antar aliran keagamaan: studi kasus konflik antara NU dan Muhammadiyah dalam mengadakan ritual Nyadran di Desa Sugio, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan*”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan ada suatu tradisi yang diyakini dan masih dijaga sampai sekarang, dan tradisi tersebut dilaksanakan setiap setahun sekali. Dari tradisi tersebutlah yang menimbulkan konflik antar aliran agama, yaitu aliran NU dan Muhammadiyah. Pihak dari NU masih menjaga dan melestarikan budaya tersebut dari nenek moyang mereka, sedangkan dari Muhammadiyah memandang tradisi tersebut bertentangan dengan syariat Islam, bahwa Islam tidak pernah mengajarkan hal tersebut dan dianggap bid’ah.

Pada tahun 2008, skripsi karya Shoddiq Raharjo, Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menulis skripsinya berjudul “*Konflik Antara NU dan Muhammadiyah (1960-2002): Studi Kasus di Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta*”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang bagaimana munculnya konflik antara NU dan Muhammadiyah. Masyarakat desa tersebut dahulunya mayoritas beraliran NU. Setelah datangnya aliran baru yang disebut faham Muhammadiyah, masyarakat yang awalnya adalah masyarakat homogen, kemudian menjadi masyarakat yang heterogen sehingga menjadi kategori NU dan Muhammadiyah bahkan sempat terjadi konflik berupa celaan. Konflik verbal yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari lama kelamaan menjadikan munculnya bentrok fisik. Namun konflik tersebut dapat diselesaikan dengan adanya pihak penengah yang mendamaikannya. Setelah konflik tersebut lahirlah norma baru dimana sesuai kesepakatan bersama masyarakat setempat membangun Masjid At-Taqwa, dimana masjid tersebut tidak diperkenankan membawa bendera organisasi masyarakat sendiri-sendiri. Dalam struktur di dalam masjid tersebut telah diatur mulai dari pengurus ta’mir dibuat berimbang antara NU dan Muhammadiyah, dan hari raya juga mengikuti pemerintah, tidak mengikuti salah satu aliran agama tersebut.

Pada penelitian ini penulis menggunakan prespektif sosiologi bahwa dalam kehidupan bermasyarakat tidak ada kerukunan yang hakiki tanpa adanya sebuah konflik di tengah masyarakat.

